PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**
Jalan Jemur Andayani I, Siwalankerto, Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237
Telepon (031) 8477551, Laman bkd.jatimprov.go.id, Pos-el bkd@jatimprov.go.id

Surabaya, 1 Juli 2025

Nomor : 800.1.2.1/4240/204.2/2025
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : 2 (dua) lembar
Hal : Distribusi Formasi JF Perencana

Yth. Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur
(Terlampir)
di
Tempat

Menindaklanjuti surat Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas Nomor: B-09521/P.01/DL.06.04/06/2025 tanggal 19 Juni 2025 perihal Rekomendasi Formasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) di Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan hasil Rapat Pembahasan Rekomendasi Formasi JFP yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2025, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Total rekomendasi kebutuhan formasi JF Perencana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur adalah sebanyak 295 formasi yang terdiri dari:

| No | Jenjang JF Perencana | Kebutuhan |
|---|---|---|
| 1 | Perencana Ahli Utama | 2 |
| 2 | Perencana Ahli Madya | 42 |
| 3 | Perencana Ahli Muda | 92 |
| 4 | Perencana Ahli Pertama | 159 |

2. Distribusi alokasi formasi JF Perencana pada masing-masing Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan:
   a. Usulan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
   b. Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (ABK);
   c. Prioritas pembangunan daerah dan program strategis Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
   d. Kompleksitas dan volume kegiatan perencanaan pada Perangkat Daerah; dan
   e. Karakteristik wilayah kerja Perangkat Daerah

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai *qrcode* yang tersedia.

3. Rincian alokasi formasi JFP pada Perangkat Daerah sebagaimana terlampir dalam surat ini digunakan sebagai dasar perencanaan kebutuhan dan manajemen karier Jabatan Fungsional Perencana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur setelah mendapatkan persetujuan kebutuhan JF dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan
4. Apabila terjadi perubahan organisasi atau nomenklatur jabatan yang berdampak pada tugas dan fungsi JFP, maka alokasi formasi JF Perencana dapat ditinjau kembali dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Jawa Timur,



Indah Wahyuni, S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19670409 199202 2 003

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai *qrcode* yang tersedia.

Lampiran I Kepala BKD Provinsi Jawa Timur
Nomor : 800.1.2.1/4240/204.2/2025
Tanggal : 2 Juli 2025

**DAFTAR PERANGKAT DAERAH**

1. Badan Kepegawaian Daerah
2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
3. Badan Koordinasi Wilayah Bojonegoro
4. Badan Koordinasi Wilayah Jember
5. Badan Koordinasi Wilayah Madiun
6. Badan Koordinasi Wilayah Malang
7. Badan Koordinasi Wilayah Pamekasan
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
9. Badan Pendapatan Daerah
10. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
11. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
12. Badan Penghubung Daerah Provinsi
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
14. Badan Riset dan Inovasi Daerah
15. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
16. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
17. Dinas Kehutanan
18. Dinas Kelautan Dan Perikanan
19.. Dinas Kepemudaan Dan Olahraga
20. Dinas Kesehatan
21. Dinas Komunikasi dan Informatika
22. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
23. Dinas Lingkungan Hidup
24. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
25. Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air
26. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
27. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan
28. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
29. Dinas Pendidikan
30. Dinas Perhubungan
31. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
32. Dinas Perkebunan
33. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
34. Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
35. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya
36. Dinas Peternakan
37. Dinas Sosial
38. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
39. Inspektorat Provinsi
40. RS Jiwa Menur
41. RS Mata Masyarakat Jawa Timur
42. RS Paru Jember
43. RS Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur
44. RSUD Daha Husada
45. RSUD Dr. Saiful Anwar
46. RSUD Dr. Soedono Madiun
47. RSUD Dr. Soetomo

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai *qrcode* yang tersedia.

48. RSUD Dungus
49. RSUD Haji Provinsi Jawa Timur
50. RSUD Husada Prima
51. RSUD Karsa Husada Batu
52. RSUD Mohammad Noer Pamekasan
53. RSUD Sumberglagah
54. Satuan Polisi Pamong Praja
55. Sekretariat Daerah
56. Sekretariat DPRD

Balai Besar Sertifikasi Elektronik

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara (BSrE-BSSN). Legalitas berkas secara digital diatur oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur. Untuk mengetahui keabsahan berkas dapat dilakukan dengan memindai *qrcode* yang tersedia.

**KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/**
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**
**REPUBLIK INDONESIA**

Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10310
Telepon (+6221) 31936207, 3905650; Faksimile (+6221) 3145374
www.bappenas.go.id

Nomor : B-09521/P.01/DL.06.04/06/2025 Jakarta, 19 Juni 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) lembar
Hal : Rekomendasi Formasi Kebutuhan JFP di Pemerintah Provinsi Jawa Timur

Yth. Sekretaris Daerah
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
di Tempat

Sebagaimana Surat Bapak nomor 800.1.1.2/2893/204.2/2025 tentang Permohonan Rekomendasi Formasi JF Perencana di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, bersama ini kami sampaikan bahwa Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas mendukung dan mengapresiasi upaya pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) Perencana di Instansi Pengguna Jabatan Fungsional Perencana (JFP).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami telah mengundang perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melakukan Verifikasi dan Validasi Permohonan Kebutuhan Formasi Jabatan Fungsional Perencana (JFP) pada tanggal 19 Juni 2025. Berdasarkan hasil kegiatan dimaksud, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pada prinsipnya kami selaku Instansi Pembina JFP merekomendasikan Formasi Kebutuhan JFP di Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana tabel rekomendasi formasi terlampir; dan
2. Pengisian kebutuhan formasi serta rencana penempatan JFP di instansi pengguna dapat dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dan dapat dilakukan penyesuaian setidaknya dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak penetapan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi jabatan dan beban kerja.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan
Pelatihan Sumber Daya Manusia Perencanaan
Pembangunan

Wignyo Adiyoso

Tembusan:
1. Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
3. Kepala BKD Provinsi Jawa Timur;
4. Kepala Bappeda Provinsi Jawa Timur.

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

Lampiran : Tabel Rekomendasi Formasi JFP
Nomor : B-09521/P.01/DL.06.04/06/2025
Tanggal : 19 Juni 2025

TABEL REKOMENDASI FORMASI KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA
DI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

Nama Instansi : Pemerintah Provinsi Jawa Timur

| No. | Jenjang Jabatan | *Bezetting* Pegawai saat ini | Hasil Penghitungan Kebutuhan | Lowongan Kebutuhan |
|---|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) = (4) – (3) |
| 1 | Perencana Ahli Pertama | 66 | 159 | 93 |
| 2 | Perencana Ahli Muda | 39 | 92 | 53 |
| 3 | Perencana Ahli Madya | 8 | 42 | 34 |
| 4 | Perencana Ahli Utama | 0 | 2 | 2 |
| **Jumlah** | | **113** | **295** | |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara*

**REKAPITULASI DISTRIBUSI FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PERENCANA**
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**

| NO | PERANGKAT DAERAH | JENJANG JABATAN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PERTAMA | MUDA | MADYA | UTAMA |
| 1 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 2 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | BADAN KOORDINASI WILAYAH BOJONEGORO | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | BADAN KOORDINASI WILAYAH JEMBER | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | BADAN KOORDINASI WILAYAH MADIUN | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6 | BADAN KOORDINASI WILAYAH MALANG | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | BADAN KOORDINASI WILAYAH PAMEKASAN | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH | 30 | 20 | 15 | 2 |
| 14 | BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | BIRO HUKUM | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | BIRO ORGANISASI | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | BIRO PENGADAAN BARANG/JASA | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | BIRO PEREKONOMIAN | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | BIRO UMUM | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 24 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 25 | DINAS KEHUTANAN | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 26 | DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 27 | DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | DINAS KESEHATAN | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 29 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 30 | DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 31 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 32 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA | 4 | 1 | 1 | 0 |

| NO | PERANGKAT DAERAH | JENJANG JABATAN | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | PERTAMA | MUDA | MADYA | UTAMA |
| 33 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 34 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 35 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KEPENDUDUKA | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 36 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 37 | DINAS PENDIDIKAN | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 38 | DINAS PERHUBUNGAN | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 39 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 40 | DINAS PERKEBUNAN | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 41 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 43 | DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 44 | DINAS PETERNAKAN | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | DINAS SOSIAL | 4 | 3 | 1 | 0 |
| 46 | DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 47 | INSPEKTORAT PROVINSI | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | RS JIWA MENUR | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 49 | RS MATA MASYARAKAT JAWA TIMUR | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 50 | RS PARU JEMBER | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 51 | RS PARU MANGUHARJO PROVINSI JAWA TIMUR | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 52 | RSUD DAHA HUSADA | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 53 | RSUD dr. SAIFUL ANWAR | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 54 | RSUD dr. SOEDONO MADIUN | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 55 | RSUD dr. SOETOMO | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 56 | RSUD DUNGUS | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 57 | RSUD HAJI PROVINSI JAWA TIMUR | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 58 | RSUD HUSADA PRIMA | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 59 | RSUD KARSA HUSADA BATU | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 60 | RSUD MOHAMMAD NOER PAMEKASAN | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 61 | RSUD SUMBERGLAGAH | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 62 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 63 | SEKRETARIAT DAERAH (adpim) | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 64 | SEKRETARIAT DPRD | 2 | 1 | 1 | 0 |
| | **TOTAL** | **159** | **92** | **42** | **2** |